



LAPORAN SINGKAT

KOMISI VIII DPR RI

BERMITRA DENGAN KEMENTERIAN AGAMA RI, KEMENTERIAN SOSIAL RI, KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI), BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (BNPB), BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH), BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS), DAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI).

Rapat Ke : 25
Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : I
Jenis Rapat/ke- : RDP Panja Komisi VIII DPR RI mengenai Penyelenggaraan Umrah dan Haji Khusus / ke-1
Dengan : Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag RI, Dewan Komisioner OJK, dan Kepala Bareskrim POLRI
Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari, Tanggal : **Kamis, 12 Oktober 2017**
Waktu : Pukul 13.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II Lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270
Ketua Rapat : **DR. IR. H. Sodik Mudjahid, M.Sc**
Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto, S.H
Acara : Menindaklanjuti pembahasan kasus First Travel
Hadir : 1. orang dari 26 orang Anggota Komisi VIII DPR RI.
2. Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah beserta jajarannya
3. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 14.55 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, DR. Ir. H. Sodik Mudjahid, M.Sc sesuai tempat dan acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Panja Komisi VIII DPR RI mengenai penyelenggaraan ibadah umrah dan haji khusus dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI, dan Otoritas Jasa Keuangan dengan agenda Penyelesaian korban biro perjalanan umrah PT. FIRST TRAVEL, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI, Kementerian Agama RI, Otoritas Jasa Keuangan sepakat akan melakukan pembelaan terhadap korban jemaah umrah PT. First Travel dan menyerahkan permasalahan ini kepada proses hukum.
2. Komisi VIII DPR RI, Kementerian Agama RI dan Otoritas Jasa Keuangan secara bersama-sama melakukan pengawalan proses hukum yang sedang berjalan di Kepolisian RI.
3. Komisi VIII DPR RI meminta Kementerian Agama RI dan Otoritas Jasa Keuangan untuk membantu penyelesaian proses hukum yang sedang berjalan.
4. Komisi VIII DPR RI akan mengagendakan rapat gabungan dengan BARESKRIM POLRI, PPAK, Ombudsman, Kementerian Pariwisata dan lembaga yang terkait.
5. Komisi VIII DPR RI Mendesak Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI untuk memperbaiki kualitas Penyelenggaraan ibadah umrah dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap perusahaan penyelenggara ibadah umrah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 17.20 WIB

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
WAKIL KETUA,**

ttd

DR. Ir. H. SODIK MUDJAHID, M.Sc